

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) Menyatakan “Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014, menjadikan Desa tidak lagi sebagai obyek pembangunan, akan tetapi menjadi subyek pembangunan. Selain itu Desa juga mendapatkan hak dan kewajiban untuk mengatur sistem pemerintahan sendiri. Selanjutnya, Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintah Daerah telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 (tiga) jalur, meliputi: Peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, sehingga untuk mengemban misi dimaksud desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan misi yang dimaksud, Desa biasanya mempunyai Rencana dan Rancangan

pembangunan yang bertujuan untuk membangun desa harapannya dapat menjadi desa yang maju dan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 menjelaskan tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan desa juga harus melalui beberapa tahapan, terdiri dari: (i) perencanaan pembangunan desa; (ii) pelaksanaan pembangunan desa; (iii) pengawasan dan pemantauan pembangunan desa.

Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebesar 12,90 % atau 123.04 Jiwa (<https://wonogirikab.bps.go.id/>). Melihat angka yang cukup tinggi seharusnya Desa-Desa di Kabupaten Wonogiri dapat menjalankan dari program Pemerintah yang mana dapat menurunkan tingkat kemiskinan menggunakan program pemberdayaan masyarakat sesuai amanat Undang - Undang.

Pembangunan Desa merupakan kewenangan Desa sebagai upaya mewujudkan kemajuan desa dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakatnya. Oleh karena itu, tentunya penyelenggaraan pembangunan akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan Desa. Penerimaan Desa diantaranya meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), yaitu Pendapatan yang berasal dari desa itu sendiri. Selanjutnya Penerimaan Transfer, seperti penerimaan yang berasal dari transfer pemerintah Pusat maupun Daerah dan Pendapatan Lain-lain, yaitu penerimaan lainnya yang sah.

Pendapatan Asli Desa (PADesa) sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat 1 disebutkan pendapatan yang berasal dari desa itu sendiri dan terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, serta lain-lain pendapatan desa yang sah. Pendapatan Asli Desa (PADesa) digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Pendapatan Asli Desa (PADesa) bersumber dari Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

Selain Pendapatan Asli Desa (PADesa), sumber penerimaan lainnya adalah Dana Desa (DD). UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan Dana Desa (DD). Dana Desa (DD) diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), di mana kucuran Dana Desa (DD) itu tidak melewati perantara melainkan langsung ke Desa. Walaupun pada prakteknya, Dana Desa (DD) tersebut disalurkan melalui kabupaten/kota sebagai bentuk

pengawasan. Jumlah nominal Dana Desa (DD) berbeda-beda untuk tiap-tiap desa. Alokasi APBN yang sebesar 10% nanti akan menambah penerimaan desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pembagian Alokasi Dana Desa (DD) sesuai jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Disamping pendapatan Desa, Untuk menunjang kewenangan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, Desa melakukan pengeluaran yang disebut Belanja Desa. Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Klasifikasi Belanja Desa menurut kelompok terdiri dari: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Belanja Tak Terduga.

Prioritas penggunaan Dana Desa dapat disimpulkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat. Menurut Widjaja (2003:169),

Pemberdayaan Masyarakat ialah upaya dalam meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabat untuk bertahan dan mengembangkan diri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pembangunan pedesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat, karena untuk mewujudkan Kemandirian desa harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas.

Masyarakat atau penduduk dalam pemberdayaan masyarakat adalah sasaran yang akan dituju, harapannya dalam upaya peningkatan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah, masyarakat dapat merasakan dampak dari kegiatan tersebut. Besarnya Jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta infrastruktur-infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Widiagma, 2015). Secara garis besar bahwa suatu desa yang besar jumlah penduduknya otomatis akan mengeluarkan belanja besar untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Salah satu fenomena dalam topik pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menarik untuk diteliti yaitu adakah pengaruh peningkatan penerimaan Desa terhadap belanja desa guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Pada dasarnya Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Mucharomah dan Zulfikar (2018)

dengan perbedaan periode waktu, dan adanya penambahan Variabel Pemoderasi yaitu Jumlah Penduduk. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), dan Dana Desa (DD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Perubahan Alokasi Anggaran Desa-Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 dan 2017)”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka perumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah Perubahan Pendapatan Asli Desa (PADesa) berpengaruh terhadap Perubahan Alokasi Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat?
2. Apakah Perubahan Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap Perubahan Alokasi Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat?
3. Apakah Jumlah Penduduk sebagai Variabel Pemoderasi dapat Memperkuat Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Perubahan Alokasi Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat?
4. Apakah Jumlah Penduduk sebagai Variabel Pemoderasi dapat Memperkuat Pengaruh Perubahan Dana Desa (DD) terhadap Perubahan Alokasi Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Perubahan Alokasi Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa-Desa Di Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Perubahan Dana Desa (DD) terhadap Perubahan Alokasi Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa-Desa Di Kabupaten Wonogiri.
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Jumlah penduduk dalam hubungan antara Perubahan Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Perubahan Alokasi Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa-Desa Di Kabupaten Wonogiri.
4. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Jumlah penduduk dalam hubungan antara pengaruh Perubahan Dana Desa (DD) terhadap Perubahan Alokasi Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa-Desa Di Kabupaten Wonogiri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan Penelitian diatas, Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mengembangkan teori dalam kajian ilmu akuntansi sektor publik khususnya dalam bidang perencanaan penganggaran pemerintah Desa.

##### **2. Manfaat Praktis**

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan di bidang belanja desa dalam pemerintah desa serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada.

b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa mengenai Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa (DD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Perubahan Alokasi Anggaran Desa-Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 dan 2017).

c. Bagi pemerintah kabupaten dan desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan desa, terkait dengan perhitungan dana yang diberikan melalui dan oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri baik Dana Desa dan pendapatan asli desa secara proporsional dan disajikan secara transparan sehingga terwujud *good governance*.

d. Bagi pembaca dan almamater

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian



dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang belanja desa di pemerintah desa.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberi efek positif bagi masyarakat terhadap pembangunan desa di masa yang akan datang.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pemaparan latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan metode penelitian pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan metode analisis data.

**BAB IV        ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang analisis data, temuan empiris yang diperoleh oleh penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil analisis data.

**BAB V        PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran yang diharapkan pengguna dan relevan bagi penelitian selanjutnya.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**